EFEKTIVITAS PROGRAM *DUKCAPIL GOES TO SCHOOL* DALAM KEPEMILIKAN KTP-EL DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Annisa Cahyani Baasalem
NPP. 33.1086
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: anyarisnawati@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Dra. Anya Risnawati, SP., M.Si.
Email: daebygading123@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Research Gap: *Legal identity is a prerequisite for accessing public services, yet several students in Jayapura who have reached the compulsory age for electronic identity cards still face barriers in recording and owning KTP-el. The Dukcapil Goes to School program was introduced as a mobile and proactive service, but its effectiveness in the Papua context requires empirical evaluation.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of the Dukcapil Goes to School program in increasing KTP-el ownership in Jayapura City, Papua Province.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving 16 informants from the Population and Civil Registration Office, schools, teachers, and students. The analysis used Dunn's effectiveness dimensions consisting of efficiency, equity, responsiveness, appropriateness, and adequacy, supported by NVivo 12 visualization.* ***Result:*** *The program has been fairly effective because it brings KTP-el recording services closer to students, shortens service access, follows service procedures, and improves awareness of legal identity. However, effectiveness is still limited by insufficient service officers, unstable internet networks, incomplete student documents, and uneven school coverage.* ***Conclusion:*** *Dukcapil Goes to School has helped increase KTP-el ownership among students, but it still requires stronger human resources, equipment readiness, data validation, coordination with schools, and more inclusive outreach.*

Keywords: *Dukcapil Goes to School; Effectiveness; Electronic Identity Card; Legal Identity; Population Administration*

ABSTRAK

Permasalahan/Kesenjangan Penelitian: Identitas legal menjadi prasyarat penting dalam memperoleh pelayanan publik, namun sebagian pelajar wajib KTP di Kota Jayapura masih menghadapi hambatan dalam perekaman dan kepemilikan KTP-el. Program *Dukcapil Goes to School* hadir sebagai layanan jemput bola ke sekolah, tetapi efektivitasnya dalam konteks Papua perlu dievaluasi secara empiris. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program *Dukcapil Goes to School* dalam meningkatkan kepemilikan KTP-el di Kota Jayapura Provinsi Papua. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 16 informan dari unsur Disdukcapil, sekolah, guru, dan siswa. Analisis menggunakan dimensi efektivitas Dunn yang meliputi efisiensi, pemerataan, daya tanggap, ketepatan, dan kecukupan, serta didukung visualisasi *NVivo 12*. **Hasil/Temuan:** Program berjalan cukup efektif karena mendekatkan pelayanan perekaman KTP-el kepada pelajar, memperpendek akses layanan, mengikuti prosedur pelayanan, dan meningkatkan kesadaran identitas legal. Namun, efektivitas belum optimal akibat keterbatasan petugas, jaringan internet yang belum stabil, dokumen siswa yang belum lengkap, serta cakupan sekolah yang belum merata. **Kesimpulan:** Program *Dukcapil Goes to School*

membantu peningkatan kepemilikan KTP-el pelajar, tetapi memerlukan penguatan SDM, kesiapan alat, validasi data, koordinasi sekolah, dan sosialisasi yang lebih inklusif.

Kata kunci: Administrasi kependudukan; *Dukcapil Goes to School*; Efektivitas; Identitas legal; KTP-el

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el merupakan dokumen identitas resmi warga negara yang memiliki fungsi strategis dalam sistem administrasi kependudukan. KTP-el bukan hanya tanda pengenal, tetapi juga pintu masuk bagi warga untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, layanan perbankan, serta hak politik. Dalam tata kelola pemerintahan modern, data kependudukan yang valid menjadi dasar penyusunan kebijakan publik, perencanaan program, serta pemerataan pelayanan. Hutasoit (2017) menegaskan bahwa pemahaman mengenai kependudukan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam membaca dinamika penduduk dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif global, *legal identity* dipandang sebagai prasyarat penting untuk memastikan masyarakat terlihat dalam sistem pelayanan negara. Mills et al. (2019) menjelaskan bahwa keterhubungan antara pencatatan sipil, statistik hayati, dan sistem identitas nasional dapat meningkatkan akurasi data penduduk serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan sosial. Pemikiran tersebut relevan dengan pelayanan KTP-el di Indonesia karena identitas kependudukan berfungsi sebagai instrumen legal, administratif, dan pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat administrasi kependudukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Regulasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Gatiningsih (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan basis data kependudukan melalui SIAK masih membutuhkan pembaruan data, kesiapan sarana, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar produk data kependudukan semakin akurat.

Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. Kondisi geografis, sebaran sekolah, keterbatasan jaringan, perbedaan akses informasi, dan karakter sosial budaya masyarakat memengaruhi proses perekaman KTP-el bagi pelajar. Sebagian pelajar yang telah memasuki usia wajib KTP belum melakukan perekaman karena terbatasnya akses ke kantor Disdukcapil, kendala kelengkapan dokumen, rendahnya pemahaman mengenai manfaat KTP-el, serta keterbatasan waktu karena aktivitas sekolah.

Program *Dukcapil Goes to School* merupakan bentuk pelayanan jemput bola yang membawa layanan perekaman KTP-el langsung ke sekolah. Program ini diarahkan untuk mempermudah pelajar melakukan perekaman tanpa harus meninggalkan kegiatan belajar dan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Munawaroh dan Riaji (2024) menemukan bahwa *Dukcapil Goes to School* di Kabupaten Bandung mampu mendukung percepatan pelayanan KTP-el dan aktivasi identitas kependudukan digital bagi pelajar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa model pelayanan berbasis sekolah memiliki potensi besar untuk memperluas cakupan dokumen kependudukan.

Namun demikian, efektivitas program di Kota Jayapura tidak dapat hanya diukur dari keberadaan program. Penilaian harus melihat bagaimana program menggunakan sumber daya, menjangkau sekolah secara merata, merespons kendala lapangan, tepat sasaran kepada pelajar wajib KTP, dan mencukupi kebutuhan pelayanan. Daraba (2019) menekankan bahwa reformasi pelayanan publik menuntut

pemerintah memberikan layanan yang mudah, cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, Program *Dukcapil Goes to School* di Kota Jayapura perlu dianalisis secara komprehensif agar dapat diketahui capaian dan kendala pelaksanaannya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara kebutuhan *legal identity* bagi pelajar wajib KTP dan belum optimalnya kepemilikan KTP-el di Kota Jayapura. Pemerintah telah menyediakan layanan jemput bola melalui *Dukcapil Goes to School*, tetapi pelaksanaan program masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan sosial. Kesenjangan tersebut tampak pada masih adanya siswa yang belum membawa dokumen persyaratan, belum memahami manfaat KTP-el, atau belum dapat dilayani karena gangguan jaringan dan keterbatasan petugas.

Kesenjangan penelitian juga terlihat dari dominasi studi terdahulu yang banyak membahas inovasi administrasi kependudukan pada daerah dengan kondisi infrastruktur relatif lebih baik. Kajian mengenai pelayanan KTP-el bagi pelajar dalam konteks Papua masih perlu diperkuat karena karakter geografis, sosial, dan kultural Kota Jayapura berbeda dengan daerah lain. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menilai efektivitas program berdasarkan dimensi efisiensi, pemerataan, daya tanggap, ketepatan, dan kecukupan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena kepemilikan KTP-el bagi pelajar usia wajib KTP memiliki implikasi langsung terhadap pengakuan identitas, akses layanan, dan kesiapan partisipasi dalam kehidupan sosial pemerintahan. Apabila hambatan perekaman KTP-el tidak segera diatasi, pelajar berpotensi mengalami keterlambatan dalam memperoleh layanan publik yang mensyaratkan identitas resmi.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk menyusun strategi pelayanan yang lebih tepat sasaran. Rejeki et al. (2025) menekankan pentingnya sosialisasi luas melalui media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait untuk mencapai target administrasi kependudukan. Dengan demikian, evaluasi Program *Dukcapil Goes to School* memiliki urgensi untuk memperkuat strategi pelayanan, memperluas jangkauan sekolah, dan meningkatkan kualitas data kependudukan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada lima penelitian internasional bereputasi yang relevan dengan isu identitas legal, administrasi kependudukan, pelayanan KTP elektronik, digitalisasi layanan, dan penguatan sistem pencatatan sipil. Mills et al. (2019) meneliti manfaat penghubungan sistem pencatatan sipil, statistik hayati, dan manajemen identitas. Temuannya menunjukkan bahwa integrasi data identitas membantu pemerintah menyusun kebijakan berbasis data dan membantu individu membuktikan identitas untuk mengakses layanan publik.

Achmad et al. (2021) menganalisis pengaruh implementasi *e-government* terhadap kualitas pelayanan KTP elektronik di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi *e-government* berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan, tetapi masih ditemukan persoalan komunikasi dan struktur birokrasi yang panjang. Temuan ini relevan karena Program *Dukcapil Goes to School* juga membutuhkan komunikasi lintas pihak, sumber daya, dan struktur pelayanan yang efektif.

Razali et al. (2022) membahas digitalisasi registrasi kelahiran di Malaysia dan menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas layanan, tetapi juga berisiko memperkuat eksklusi bagi kelompok

rentan apabila tidak didukung lingkungan yang inklusif. Relevansi penelitian tersebut terletak pada kebutuhan sistem layanan hibrida yang tetap memberi ruang bantuan langsung bagi masyarakat yang menghadapi kesenjangan digital.

Suthar et al. (2019) melalui *systematic review* terhadap kebijakan penguatan *civil registration and vital statistics* di 25 negara menemukan bahwa pendekatan kombinasi antara komponen penyediaan layanan dan peningkatan permintaan masyarakat konsisten berkaitan dengan peningkatan angka registrasi. Hasil ini mendukung pentingnya menggabungkan pelayanan jemput bola, sosialisasi, dan penguatan koordinasi sekolah dalam Program *Dukcapil Goes to School*.

Warsono et al. (2023) mengkaji model implementasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Surabaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berkontribusi terhadap pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat, namun pelayanan tetap perlu menyediakan fasilitasi bagi masyarakat yang belum mampu mengurus layanan secara mandiri. Temuan ini memperkuat pentingnya kombinasi antara layanan digital dan bantuan langsung di lapangan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada lokus dan konteks analisis. Penelitian ini tidak hanya membahas inovasi *Dukcapil Goes to School* sebagai program pelayanan, tetapi juga menilai efektivitas program dalam konteks Kota Jayapura yang memiliki tantangan geografis, jaringan, dan sosial budaya berbeda dari banyak daerah lain. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan dimensi efektivitas Dunn (2015) yang dipadukan dengan visualisasi *NVivo 12* untuk membaca pola temuan wawancara, dokumen, dan observasi.

Penelitian ini juga menempatkan pelajar wajib KTP sebagai sasaran spesifik pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi pada kajian pelayanan publik di bidang kependudukan dengan menunjukkan bagaimana pelayanan berbasis sekolah dapat menjadi strategi untuk meningkatkan *legal identity* sekaligus memperbaiki basis data kependudukan daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program *Dukcapil Goes to School* dalam meningkatkan kepemilikan KTP-el di Kota Jayapura Provinsi Papua.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami pelaksanaan Program *Dukcapil Goes to School* secara mendalam berdasarkan pengalaman pelaksana, pihak sekolah, dan siswa sebagai penerima layanan. Simangunsong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan fenomena dalam konteks alamiah sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan proses dan dinamika lapangan secara utuh. Sugiyono (2022) juga menegaskan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menafsirkan data.

Lokasi penelitian berada di Kota Jayapura Provinsi Papua, dengan fokus pengumpulan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura serta sekolah yang menjadi sasaran Program *Dukcapil Goes to School*, terutama SMAN 4 Jayapura. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan, kewenangan, atau pengalaman langsung dalam program.

Tabel 1.
Informan Penelitian

No	Sumber Informan	Jumlah	Kode
1	Kepala Dinas Dukcapil	1	I1
2	Sekretaris Dinas Dukcapil	1	I2
3	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	1	I3
4	Kepala Bidang PIAK	1	I4
5	Kepala Sekolah	1	I5
6	Kepala Seksi Pelayanan Sistem dan Teknologi Informasi	1	I6
7	Operator SIAK	1	I7
8	Staf Bidang Pendaftaran Penduduk	2	I8
9	Guru	2	I9
10	Murid	5	I10
	Jumlah	16	

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2026

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas Dunn (2015) yang meliputi efisiensi, pemerataan, daya tanggap, ketepatan, dan kecukupan. Dimensi efisiensi digunakan untuk melihat penggunaan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan waktu pelayanan. Pemerataan digunakan untuk menilai jangkauan layanan kepada siswa. Daya tanggap digunakan untuk menilai respons petugas terhadap kebutuhan dan kendala lapangan. Ketepatan digunakan untuk melihat kesesuaian sasaran, prosedur, dan waktu pelaksanaan. Kecukupan digunakan untuk menilai apakah SDM, sarana prasarana, dan anggaran sudah memadai.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data wawancara dibandingkan dengan hasil observasi serta dokumen pelaksanaan program. Analisis dibantu dengan *NVivo 12* untuk mengelompokkan tema wawancara, menyusun *mind map*, membaca frekuensi kata, serta menampilkan hubungan tema yang mendukung interpretasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program *Dukcapil Goes to School* di Kota Jayapura merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang bertujuan mendekatkan perekaman KTP-el kepada pelajar wajib KTP. Program ini dilakukan dengan sistem jemput bola ke sekolah yang telah dijadwalkan, membawa perangkat perekaman, melakukan verifikasi data siswa, perekaman biometrik, dan pendataan siswa yang belum dapat dilayani. Dalam pelaksanaannya, program dianalisis melalui dimensi efisiensi, pemerataan, daya tanggap, ketepatan, dan kecukupan.

3.1. Visualisasi Hasil Analisis NVivo

Analisis *NVivo 12* digunakan untuk membantu peneliti mengorganisasi data wawancara dan dokumentasi. Visualisasi pertama berupa *mind map* yang menggambarkan empat tema utama yang muncul dalam penelitian, yaitu efisiensi, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Keempat tema tersebut berhubungan langsung dengan tujuan program dalam meningkatkan kepemilikan KTP-el bagi pelajar.

Gambar 1.

Mind Map Efektivitas Program *Dukcapil Goes to School*

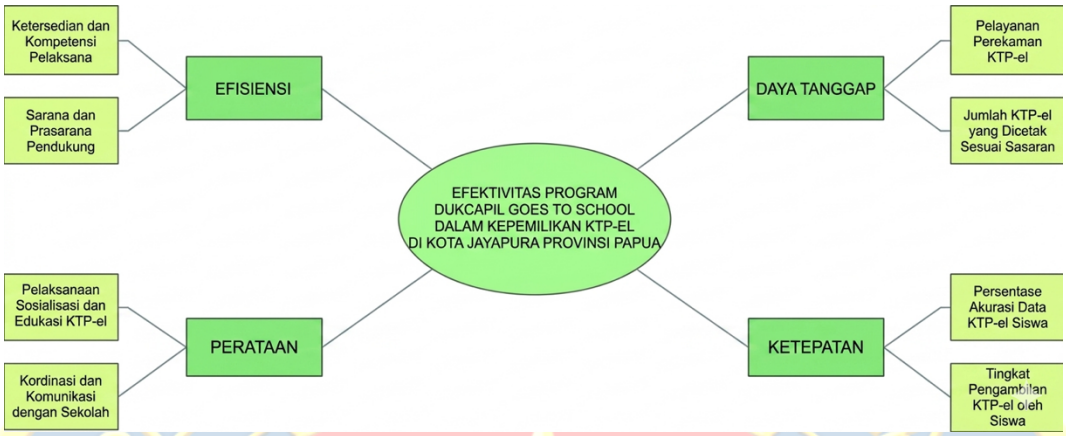

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Gambar 1 menunjukkan bahwa efektivitas program tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kesiapan pelayanan, sarana prasarana, sosialisasi, koordinasi sekolah, pelayanan perekaman, jumlah KTP-el sesuai sasaran, akurasi data, dan tingkat pengambilan KTP-el oleh siswa. Hubungan antar tema tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesesuaian antara input, proses, dan keluaran pelayanan.

Gambar 2.

Word Cloud Hasil Wawancara



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Gambar 2 memperlihatkan bahwa kata KTP-el, perekaman, pelayanan, sekolah, siswa, dan Jayapura muncul secara dominan. Dominasi kata tersebut menegaskan bahwa percakapan informan berpusat pada proses pelayanan perekaman KTP-el di sekolah dan keterlibatan siswa sebagai sasaran utama program. Temuan ini sejalan dengan fokus penelitian yang menempatkan kepemilikan KTP-el pelajar sebagai indikator penting keberhasilan program.

Gambar 3.

Word Frequency Query

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
ktp-el	6	106	9,81
pelayanan	9	58	5,37
goes_to_school	13	52	4,81
jayapura	8	32	2,96
kepemilikan	11	23	2,13
kependudukan	12	20	1,85
siswa	5	18	1,67
siswa	5	18	1,67
sekolah	7	18	1,67
sosialisasi	11	18	1,67
perekaman	9	16	1,48
efektivitas	11	13	1,20
provinsi	8	12	1,11
papua	5	12	1,11
administrasi	12	11	1,02
dukcapil	8	10	0,93
kegiatan	8	10	0,93
langsung	8	10	0,93
melaksanakan	12	10	0,93

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Gambar 3 menunjukkan hasil frekuensi kata dengan kata KTP-el muncul 106 kali, pelayanan 58 kali, *goes_to_school* 52 kali, Jayapura 32 kali, dan kepemilikan 23 kali. Frekuensi ini menunjukkan bahwa isu layanan perekaman dan kepemilikan KTP-el merupakan tema dominan dalam data penelitian. Kata sosialisasi, perekaman, siswa, dan sekolah juga muncul cukup kuat sehingga menggambarkan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program.

3.2. Efisiensi

Dimensi efisiensi menunjukkan bahwa Program *Dukcapil Goes to School* telah membantu mengurangi beban akses pelajar dalam memperoleh layanan KTP-el. Siswa tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil, sehingga waktu, biaya transportasi, dan potensi kehilangan waktu belajar dapat ditekan. Informan dari pihak siswa menyampaikan bahwa layanan lebih mudah karena perekaman dilakukan langsung di sekolah dan tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil.

Dari sisi penyelenggara, Disdukcapil Kota Jayapura membentuk tim khusus dan membawa perangkat perekaman *mobile*. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menyampaikan bahwa tim membawa alat perekaman lengkap agar pelayanan dapat dilakukan di lokasi sekolah. Selain itu, program didukung anggaran operasional sebesar Rp50.000.000 per tahun untuk transportasi petugas, pemeliharaan alat, jaringan internet, dan kebutuhan lapangan lainnya. Secara prinsip, penggunaan anggaran tersebut sebanding dengan manfaat karena satu kegiatan dapat melayani banyak siswa sekaligus.

Namun, efisiensi belum optimal karena jumlah petugas masih terbatas. Beberapa pegawai harus merangkap tugas pelayanan di kantor dan pelayanan lapangan. Keterbatasan ini berpotensi memperpanjang antrean siswa dan membatasi jumlah sekolah yang dapat dikunjungi dalam satu periode. Temuan ini sejalan dengan Achmad et al. (2021) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan KTP elektronik sangat dipengaruhi oleh sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi dalam implementasi *e-government*.

Kendala teknis juga memengaruhi efisiensi pelayanan. Staf bidang pendaftaran penduduk menyampaikan bahwa data siswa yang belum sinkron dan jaringan internet yang kurang stabil sering menjadi hambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya bergantung pada desain layanan jemput bola, tetapi juga pada kesiapan perangkat, jaringan, dan validasi data sebelum kegiatan dilaksanakan.

3.3. Pemerataan

Dimensi pemerataan terlihat dari upaya Disdukcapil Kota Jayapura menyusun jadwal kunjungan ke sekolah-sekolah di berbagai distrik. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada pelajar wajib KTP untuk melakukan perekaman. Program ini penting karena layanan administrasi kependudukan yang hanya terpusat di kantor dapat menimbulkan hambatan bagi siswa yang tinggal jauh dari pusat layanan.

Pemerataan pelayanan dalam Program *Dukcapil Goes to School* juga diwujudkan melalui koordinasi awal dengan sekolah. Pihak sekolah melakukan pendataan siswa yang telah memenuhi syarat wajib KTP agar proses pelayanan lebih tertib. Guru di SMAN 4 Jayapura menyampaikan bahwa sebelum kegiatan biasanya dilakukan koordinasi terkait jadwal dan jumlah siswa yang akan dilayani. Koordinasi ini membantu mengurangi risiko siswa tidak terdata atau tidak membawa dokumen pendukung.

Walaupun demikian, pemerataan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sekolah yang belum memperoleh jadwal atau belum terjangkau secara rutin. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan pemerataan dan kapasitas pelaksanaan. Suthar et al. (2019) menekankan bahwa peningkatan registrasi penduduk akan lebih kuat apabila pendekatan penyediaan layanan dipadukan dengan peningkatan permintaan masyarakat dan penyesuaian konteks lokal. Oleh karena itu, pemerataan program di Jayapura perlu ditopang oleh sosialisasi yang lebih luas, jadwal yang terintegrasi, dan pemetaan sekolah prioritas.

Rejeki et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pencapaian target administrasi kependudukan membutuhkan sosialisasi melalui media sosial dan kerja sama dengan instansi pengguna data kependudukan. Dalam konteks Jayapura, temuan ini relevan karena pemerataan layanan tidak cukup hanya dilakukan melalui kunjungan fisik, tetapi juga melalui penyebaran informasi yang menjangkau siswa, orang tua, dan pihak sekolah sebelum kegiatan berlangsung.

3.4. Daya Tanggap

Dimensi daya tanggap berkaitan dengan kemampuan petugas merespons kebutuhan siswa dan kendala lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas Disdukcapil cukup responsif dalam memberikan layanan perekaman, menjelaskan alur pelayanan, dan memberi solusi kepada siswa yang belum dapat direkam. Siswa yang belum sempat melakukan perekaman diarahkan untuk datang ke kantor Disdukcapil atau menunggu jadwal pelayanan berikutnya.

Daya tanggap juga tampak dari penyesuaian layanan di sekolah. Pelayanan dimulai dari verifikasi data, perekaman foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan. Jika kondisi jaringan lancar, satu siswa dapat direkam hanya dalam beberapa menit. Pernyataan siswa yang menyebut proses pelayanan cukup cepat menunjukkan bahwa respons petugas di lapangan diterima positif oleh penerima layanan.

Namun, daya tanggap masih menghadapi hambatan ketika terjadi kendala jaringan, data tidak sinkron, atau dokumen siswa belum lengkap. Kendala tersebut membutuhkan koordinasi cepat antara petugas dan sekolah. Madjid et al. 2021) menemukan bahwa program pelayanan dokumen kependudukan dapat berjalan cukup efektif, tetapi masih dihadapkan pada hambatan jaringan internet dan sosialisasi yang belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Temuan tersebut sejalan dengan

kondisi *Dukcapil Goes to School* di Jayapura yang memerlukan respons lebih cepat terhadap hambatan teknis dan administratif.

Dalam perspektif pelayanan publik, daya tanggap menjadi bagian penting dari kualitas layanan. Warsono et al. (2023) menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan tepat membutuhkan teknologi, kompetensi pelaksana, dan fasilitas yang mendukung. Program *Dukcapil Goes to School* telah bergerak ke arah tersebut, tetapi perlu memperkuat kesiapan teknis agar respons petugas tidak terhambat oleh masalah perangkat atau jaringan.

3.5. Ketepatan

Dimensi ketepatan menunjukkan bahwa program telah menyasar kelompok yang tepat, yaitu pelajar yang telah memenuhi syarat usia wajib KTP atau mendekati usia 17 tahun. Sasaran pelajar dipilih karena kelompok ini sering mengalami keterlambatan perekaman akibat kurangnya informasi, keterbatasan waktu, atau belum memahami manfaat KTP-el. Dengan mendatangi sekolah, Disdukcapil dapat menjangkau sasaran secara lebih langsung.

Ketepatan prosedur juga terlihat dari pelaksanaan pelayanan yang tetap mengikuti standar operasional prosedur perekaman KTP-el. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menegaskan bahwa walaupun pelayanan dilakukan di luar kantor, proses verifikasi data dan perekaman biometrik tetap mengikuti SOP. Hal ini penting untuk menjaga akurasi data kependudukan dan mencegah kesalahan identitas.

Ketepatan program juga didukung oleh pendataan awal oleh sekolah. Namun, masih terdapat kendala berupa data siswa yang belum sinkron dan kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan sasaran harus diikuti dengan ketepatan data awal. Gatiningsih (2015) menekankan bahwa ketidakakuratan *database* kependudukan dapat menghambat pelaksanaan SIAK dan produk data kependudukan. Dalam konteks Jayapura, validasi data sebelum perekaman menjadi prasyarat agar pelayanan di sekolah tidak terhambat.

Mills et al. (2019) menjelaskan bahwa sistem identitas nasional yang terhubung dengan data pencatatan sipil dan registrasi lain dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan terpilah. Temuan ini memperkuat pentingnya ketepatan data KTP-el siswa sebagai bagian dari penguatan basis data kependudukan daerah. KTP-el yang akurat tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi pemerintah dalam merencanakan pelayanan publik.

3.6. Kecukupan

Dimensi kecukupan menunjukkan bahwa Program *Dukcapil Goes to School* telah memiliki dukungan dasar berupa petugas, perangkat perekaman, anggaran operasional, dan koordinasi sekolah. Sarana perekaman seperti komputer, kamera, alat perekam sidik jari, iris mata, serta jaringan pendukung dibawa ke sekolah sasaran. Dukungan tersebut memungkinkan pelayanan dilakukan di luar kantor Disdukcapil.

Akan tetapi, kecukupan sumber daya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang merata. Jumlah petugas terbatas, perangkat pelayanan tidak selalu mampu mengatasi gangguan teknis, dan jaringan internet di beberapa lokasi belum stabil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa program membutuhkan penguatan kapasitas agar dapat menjangkau lebih banyak sekolah dengan kualitas layanan yang konsisten.

Razali et al. (2022) mengingatkan bahwa digitalisasi layanan administrasi dapat memperluas akses, tetapi juga dapat menciptakan risiko eksklusi apabila kelompok rentan tidak didampingi. Hal ini relevan bagi Jayapura karena pelayanan berbasis perangkat digital harus tetap dilengkapi dengan

pendampingan langsung, validasi manual saat dibutuhkan, dan bantuan kepada siswa atau orang tua yang belum memahami prosedur administrasi.

Kecukupan juga berkaitan dengan kesinambungan sosialisasi. Banyak siswa belum memahami pentingnya KTP-el atau belum membawa dokumen pendukung. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan sebelum jadwal perekaman melalui pihak sekolah, wali kelas, grup orang tua, dan media sosial resmi. Munawaroh dan Riaji (2024) menunjukkan bahwa *Dukcapil Goes to School* dapat mempercepat pelayanan administrasi kependudukan apabila didukung kemudahan diamati, kesesuaian program, dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat inovasi.

Tabel 2.

Ringkasan Temuan Berdasarkan Dimensi Efektivitas

Dimensi	**Temuan Utama**	**Interpretasi**
Efisiensi	Program mendekatkan pelayanan ke sekolah, menghemat waktu siswa, dan memanfaatkan anggaran operasional untuk pelayanan lapangan.	Cukup efektif, tetapi masih terkendala keterbatasan petugas dan jaringan.
Pemerataan	Disdukcapil menyusun jadwal kunjungan dan berkoordinasi dengan sekolah.	Belum optimal karena belum semua sekolah terjangkau secara merata.
Daya tanggap	Petugas memberi layanan cepat, menjelaskan alur, dan memberi solusi bagi siswa yang belum terekam.	Cukup responsif, tetapi perlu dukungan teknis yang lebih siap.
Ketepatan	Program menyasar pelajar wajib KTP dan tetap mengikuti SOP perekaman.	Tepat sasaran, tetapi validasi data awal perlu diperkuat.
Kecukupan	Tersedia petugas, alat, anggaran, dan dukungan sekolah.	Belum sepenuhnya memadai karena jumlah SDM dan perangkat perlu ditambah.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Program *Dukcapil Goes to School* di Kota Jayapura telah meningkatkan kemudahan akses perekaman KTP-el bagi pelajar. Sama halnya dengan temuan Warsono et al. (2023), kemudahan layanan administrasi kependudukan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi dan kesiapan pelayanan yang membuat masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. Dalam penelitian ini, pelayanan di sekolah membuat siswa lebih mudah memperoleh layanan karena tidak harus datang ke kantor Disdukcapil.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Achmad et al. (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi *e-government* berpengaruh pada kualitas pelayanan KTP elektronik. Namun, perbedaan konteks Jayapura memperlihatkan bahwa *e-government* dan perangkat perekaman *mobile* belum cukup apabila jaringan internet, jumlah petugas, dan validasi data belum memadai. Artinya, teknologi perlu diikuti dengan kesiapan organisasi dan koordinasi lintas pihak.

Berbeda dengan konteks digitalisasi yang sepenuhnya menekankan pelayanan online, penelitian ini menunjukkan pentingnya model hibrida. Razali et al. (2022) menegaskan bahwa digitalisasi dapat menimbulkan risiko eksklusi bagi kelompok yang mengalami hambatan akses. Program *Dukcapil Goes*

to School justru menjadi contoh pelayanan hibrida karena menggunakan perangkat digital, tetapi pelayanan dilakukan secara langsung di sekolah dengan bantuan petugas.

Temuan ini juga memperkuat Suthar et al. (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan registrasi penduduk lebih berhasil apabila pendekatan *supply* dan *demand* berjalan bersamaan. Pada sisi *supply*, Disdukcapil menyediakan petugas, perangkat, dan jadwal kunjungan. Pada sisi *demand*, sekolah dan siswa perlu didorong melalui sosialisasi agar memahami manfaat KTP-el dan menyiapkan dokumen sebelum perekaman.

Dalam konteks karya dosen IPDN, temuan penelitian sejalan dengan Gatiningsih (2015) mengenai pentingnya akurasi *database* kependudukan dan kesiapan SDM dalam pelaksanaan SIAK. Temuan penelitian juga sejalan dengan Madjid et al. (2021) yang menunjukkan bahwa program pelayanan dokumen kependudukan dapat berjalan cukup efektif, tetapi sering menghadapi hambatan jaringan dan sosialisasi. Selain itu, Rejeki et al. (2025) menguatkan pentingnya kolaborasi dengan instansi terkait dan pemanfaatan media sosial untuk mencapai target administrasi kependudukan.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik pertama adalah rendahnya kepemilikan KTP-el di kalangan pelajar tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis pelayanan, tetapi juga oleh pemahaman siswa dan orang tua. Sebagian siswa belum membawa dokumen pendukung karena belum memahami prosedur dan manfaat KTP-el. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi sebaiknya dilakukan sebelum hari perekaman, bukan hanya pada saat kegiatan berlangsung.

Temuan menarik kedua adalah sekolah memiliki peran strategis sebagai penghubung antara Disdukcapil dan siswa. Sekolah dapat membantu pendataan, menyampaikan informasi kepada siswa dan orang tua, serta memastikan siswa yang memenuhi syarat hadir saat jadwal perekaman. Karena itu, efektivitas program tidak hanya bergantung pada Disdukcapil, tetapi juga pada kesiapan sekolah sebagai mitra layanan.

Temuan menarik ketiga adalah perlunya penguatan pelayanan berkelanjutan. Siswa yang belum berhasil direkam karena data belum sinkron, dokumen belum lengkap, atau jaringan bermasalah perlu masuk dalam daftar tindak lanjut. Dengan demikian, program tidak berhenti pada satu kali kunjungan, tetapi menjadi siklus pelayanan yang memastikan setiap siswa sasaran memperoleh kesempatan hingga KTP-el benar-benar dimiliki.

IV. KESIMPULAN

Program *Dukcapil Goes to School* dalam kepemilikan KTP-el di Kota Jayapura Provinsi Papua telah berjalan cukup efektif karena mampu mendekatkan layanan perekaman kepada pelajar, mempercepat akses layanan, mengikuti prosedur perekaman, serta meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya identitas legal. Namun, efektivitas program belum optimal secara keseluruhan karena masih terdapat keterbatasan petugas, jaringan internet yang belum stabil, data siswa yang belum sinkron, dokumen pendukung yang belum lengkap, dan jangkauan sekolah yang belum merata.

Berdasarkan dimensi efektivitas, efisiensi program cukup baik karena mengurangi beban akses siswa, tetapi terbatas oleh jumlah SDM dan kendala teknis. Pemerataan sudah diupayakan melalui penjadwalan sekolah, tetapi belum menjangkau seluruh sekolah secara optimal. Daya tanggap petugas cukup baik, tetapi memerlukan dukungan perangkat dan jaringan yang lebih siap. Ketepatan sasaran sudah terlihat karena program menyasar pelajar wajib KTP, tetapi validasi data perlu diperkuat. Kecukupan sumber daya masih perlu ditingkatkan melalui penambahan petugas, perangkat perekaman, dan strategi sosialisasi yang lebih masif.

Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lokus yang hanya berfokus pada Kota Jayapura dan informan yang terbatas pada unsur Disdukcapil, sekolah, guru, dan siswa.

Arah penelitian masa depan (*future work*). Arah penelitian masa depan dapat dilakukan dengan membandingkan efektivitas Program *Dukcapil Goes to School* pada beberapa sekolah atau distrik, menggunakan data kuantitatif kepemilikan KTP-el sebelum dan sesudah program, serta mengkaji integrasi layanan KTP-el dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, pihak sekolah, guru, siswa, serta seluruh informan yang telah memberikan informasi dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Achmad, M., Patu, M., & Ashariana, A. (2021). The effect of e-government implementation on the quality of electronic identity card public service in Indonesia. *Croatian and Comparative Public Administration, 21*(2), 259–281. https://doi.org/10.31297/hkju.21.2.3

Daraba, D. (2019). *Reformasi dan pelayanan publik*. Leisyah. https://eprints.unm.ac.id/12083/

Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An introduction* (5th ed.). Pearson Education.

Gatiningsih. (2015). Identifikasi *data base* kependudukan sebagai produk pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dukcapil, 3*(2), 107–126. https://eprints.ipdn.ac.id/2404/

Hutasoit, I. (2017). *Pengantar ilmu kependudukan*. Alfabeta. https://eprints.ipdn.ac.id/5508/

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*.

Madjid, U., Nurrahman, A., & Ramadhani, N. A. P. (2021). Efektivitas Program Tarjilu Okke di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Registratie, 3*(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2363/1151

Mills, S., Lee, J. K., & Rassekh, B. M. (2019). Benefits of linking civil registration and vital statistics with identity management systems for measuring and achieving Sustainable Development Goal 3 indicators. *Journal of Health, Population and Nutrition, 38*(Suppl. 1), Article 18. https://doi.org/10.1186/s41043-019-0178-0

Munawaroh, N., & Riaji, I. A. R. (2024). Dukcapil Goes to School sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan E-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8*(2), 25–36. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1428

Razali, R. M., Duraisingam, T. J., & Lee, N. N. X. (2022). Digitalisation of birth registration system in Malaysia: Boon or bane for the hard-to-reach and marginalised? *Journal of Migration and Health, 6*, Article 100137. https://doi.org/10.1016/j.jmh.2022.100137

Rejeki, W. R. S., Hutasoit, I., & Indramayu. (2025). Pencapaian target nasional pada bidang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Konstituen, 7*(1), 87–103. https://doi.org/10.33701/jk.v7i1.5389

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan* (Cet. 3). Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suthar, A. B., Khalifa, A., Yin, S., Wenz, K., Ma Fat, D., Mills, S. L., Nichols, E., AbouZahr, C., & Mrkic, S. (2019). Evaluation of approaches to strengthen civil registration and vital statistics systems: A systematic review and synthesis of policies in 25 countries. *PLOS Medicine, 16*(9), Article e1002929. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002929

Warsono, H., Suprastiyo, A., & Astuti, R. S. (2023). Model of implementation of population and civil registration services in the Surabaya City Government Indonesia. *WSEAS Transactions on Environment and Development, 19*, 98–109. https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.9

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956